



# RENJA



## **RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas bimbinganNya, Rancangan awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan awal Renja OPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan di Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan gambaran target kinerja tahun 2024 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Diharapkan dengan adanya Disperkim Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi kepada **Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman**".

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rancangan Awal Renja OPD ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang aktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan Renja 2024 ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 ini, Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, Desember 2022

**KEPALA DINAS**

  
**ARFIANSYAH**



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun dalam beberapa tahapan, yaitu

a. **Persiapan penyusunan;**

Pada tahapan ini perangkat daerah membentuk tim Renja Perangkat Daerah dan melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan perangkat daerah.

b. **Penyusunan rancangan awal;**

Penyusunan rancangan awal renja dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Rancangan awal renja disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

c. **Penyusunan rancangan**

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

d. **Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.**

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.

e. Perumusan rancangan akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

f. Penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

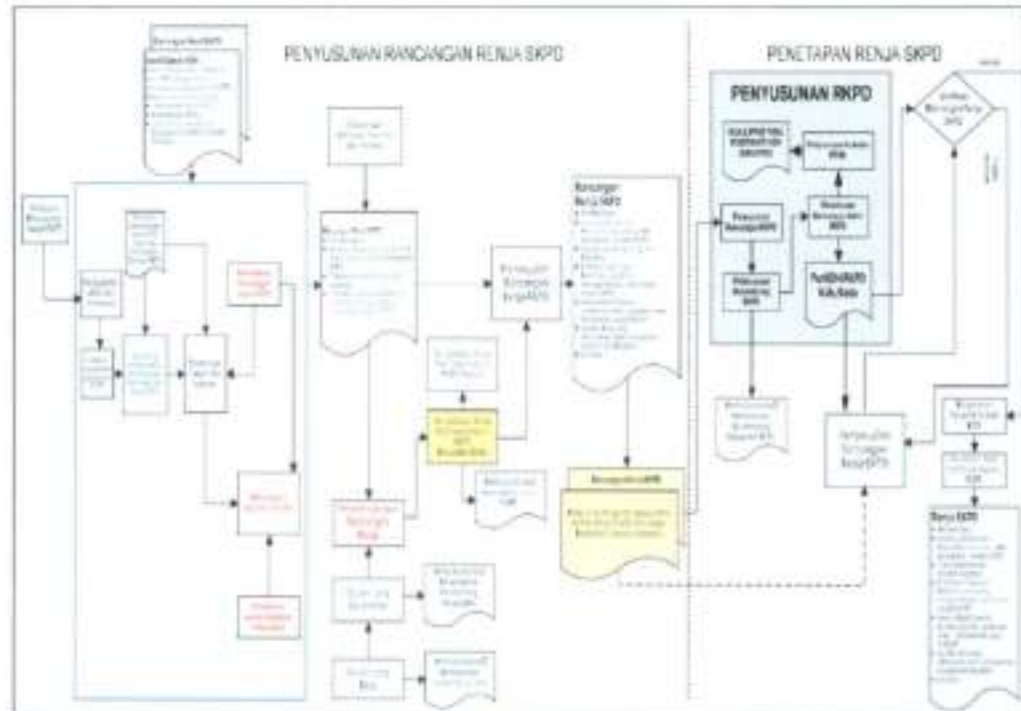
Dalam hal hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA tersebut, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berikut adalah gambar tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

**Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Untuk dapat mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 , Disperkim Kota Balikpapan menyusun Ranwal Renja Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pembuatan Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah di muktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah dimuktahirkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024, disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah :

- 1) Pedoman kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2024.
- 2) Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kinerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024
- 3) Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024

### **1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2024. Sistematika penyajian Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TAHUN 2022**, Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**, Menjelaskan secara ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan OPD.
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Menjelaskan secara ringkas tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- BAB IV. PENUTUP**, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seumpama ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.



**BAB. II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2022**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Balikpapan. Adapun Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diatur berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal. Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan Renja Tahun 2022, selanjutnya dilakukan evaluasi Renja 2022 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP;
  3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;
  4. Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;
  5. Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
  6. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;

7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  8. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
2. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan;
3. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
5. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
6. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
7. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;
8. Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;
9. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;
10. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;
11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
12. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
13. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
14. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh;
15. Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh;
16. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;

17. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
  18. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  19. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  20. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  21. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  22. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  23. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  24. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  25. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  26. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  27. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
  28. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  29. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  30. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
1. Program Kawasan Permukiman;
  2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
  3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
11. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;
12. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
13. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Penerbitan Iain Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Realisasi kegiatan sampai dengan tahun ini adalah jumlah perumahan sesuai rekomendasi rencana tapak yang diberikan adalah 10 perumahan yaitu baseline 2021 terdapat 7 perumahan sesuai rencana tapak dan 3 perumahan sesuai rencana tapak yang diterbitkan. Ketidaktercapaian target dikarenakan dilakukannya pengetatan kriteria dalam rekomendasi rencana tapak dalam usaha mendukung pengendalian banjir Kota Balikpapan
Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Sub kegiatan ini memiliki target sosialisasi kepada 50 pengembang perumahan yang ada di Kota Balikpapan. Penentuan luasan minimum kavling perumahan dalam Rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021 -2041 untuk zona perumahan dengan kepadatan sedang (R-3) adalah sebesar 120 m <sup>2</sup> , sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman luasan minimum kavling untuk perumahan adalah sebesar 60 m <sup>2</sup> . Luasan kavling minimum sebesar 120 m <sup>2</sup> menimbulkan kendala dan hambatan untuk pengembang perumahan dalam penyediaan perumahan untuk MBR. Kendala yang timbul tersebut memunculkan kebijakan penyesuaian target kinerja sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP menjadi 0 pada saat ditetapkannya Renja Perubahan Disperkim Tahun 2022.
Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Tim Fasilitator	Indikator kinerja sub kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator adalah jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih dengan target sebanyak 50 orang. Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan pembentukan dan pelatihan tim tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Desember 2022. Pendataan SPM Perumahan Rakyat pada kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

	baru selesai pada akhir Desember 2022 sehingga pengusulan dan penerbitan SK Bencana yang menjadi dasar pembentukan Tim Satgas, pendamping dan fasilitator belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022
Sub Kegiatan Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Tidak adanya penyediaan bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah korban bencana serta bantuan relokasi membuat realisasi kinerja jumlah frekuensi rebug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana menjadi 0.
Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kamar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terhuni dengan target kamar terhuni sebanyak 507 kamar. Realisasi dari target ini adalah terisinya 437 hunian teradap keseluruhan hunian rusunawa yang tersedia. Evaluasi yang dilakukan terkait tidak tercapainya target tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang rusunawa dan oleh sebab itu di tahun mendatang, penyebarluasan informasi tentang rusunawa akan ditingkatkan di 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Indikator sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian adalah jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 10 penyediaan PSU dan terealisasi 30%. 3 (tiga) rekomendasi rencana tapak perumahan di keluarkan pada tahun 2022 Ketidaktercapaian target kinerja ini adalah dari 12 pemohon rencana tapak hanya 3 perumahan yang terverifikasi sesuai dengan syarat dan kriteria terkait
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Target kinerja sebanyak 27 pembayaran. Terjadi kesalahan penginputan target kinerja ke aplikasi SIPD. Target kinerja seharusnya 12 pembayaran. Realisasi kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah 44,44 % yakni berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon yang digunakan untuk keperluan operasional Disperkim Kota Balikpapan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 12 kali pembayaran rekening.
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target kinerja 7 unit kendaraan dan terealisasi sebanyak 5 unit kendaraan yang dipelihara dengan tingkat capaian 85,71 % berupa pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin seperti AC, Komputer, Laptop. Ketidaktercapaian karena kinerja dikarenakan efisiensi peralatan mesin.

## 2. Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program ini memiliki indikator persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan dengan target kinerja 1,39 % yang didapat dari 4 perumahan terhadap 288 pengembang perumahan.
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan memiliki indikator kinerja jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara dengan target 3 Ha dan terealisasi 100%.
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;	Kegiatan ini memiliki indikator kinerja persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan target 16,67 % yang didapat dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 1 kawasan (kecamatan) terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan permukiman sebanyak 6 kawasan (kecamatan).



Program/ Kegiatan	Faktor terpecahnya target kinerja program/ kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Kegiatan ini memiliki indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dengan target tahun 2022 sebesar 26,11 % yang didapat dari jumlah Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani tahun 2022 seluas 1,41 Ha terhadap 5,4 Ha kawasan kumuh di bawah 10 ha di Kelurahan Damai
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator kegiatan ini adalah jumlah kawasan yang dilakukan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan target kinerja 1 kawasan dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota;	Indikator kinerja sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota adalah jumlah lokasi yang dilakukan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target yang semula sebesar 2 lokasi menjadi 6 lokasi pada saat Renja Perubahan Tahun 2022. Perubahan lokasi terjadi karena pada saat penyusunan Renja Tahun 2022 hanya menyangar 2 (dua) kelurahan yaitu Gunung Sari Ulu dan Baru Ulu namun terjadi perubahan menjadi 6 lokasi yang terdiri dari 6 Kecamatan di Kota Balikpapan. Realisasi dari indikator Sub Kegiatan ini adalah 100% atau anggaran yang dikeluarkan mencukupi untuk mendata rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kota di semua kecamatan di Kota Balikpapan.
Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan;	Indikator sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan adalah jumlah dokumen lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen dan memiliki capaian 1 dokumen.
Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;	Indikator sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana adalah jumlah dokumen pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dengan target sebanyak 1 dokumen pendataan dan terealisasi 100 %.
Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;	Indikator sub kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus adalah jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus dengan target sebanyak 1 dokumen RP3KP Tahun 2022 -2042 dan terealisasi 100 %.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dengan target 86 lokasi perumahan dan terealisasi 86 lokasi perumahan. Data pengawasan tersebut juga dituangkan dalam master data perumahan berbasis <i>Geographic Information System (GIS)</i> . Capaian indikator ini adalah 100%.
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;	Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan yang disusun sebanyak 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan menghasilkan dokumen revisi Perda 5 Tahun 2013 , dokumen pendataan PSU Perumahan se Kota Balikpapan dan dokumen perencanaan penyediaan taman.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;	Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan adalah jumlah rapat koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Target kinerja tahun 2022 adalah 12 kali rapat koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Perumahan Kumuh.	Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh dengan target 10 kali rapat dan terealisasi 10 kali dengan capaian 100%.
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang dibentuk dan dibina dengan target 6 KSM di/KPP di masing -masing kecamatan yang ada di Kota Balikpapan. Realisasi kegiatan ini adalah 100%.



<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan</b>
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman Kumuh	Indikator jumlah luasan pelaksanaan pembangunan pemukiman/perumahan/perumahan kumuh memiliki target kinerja 1,41 Ha dan terealisasi 100%. Penanganan dilakukan di RT. 04 Kelurahan Damai.
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Indikator sub kegiatan Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh adalah jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target 3 (tiga) dokumen dan terealisasi 100% dengan tersedianya dokumen pendataan RTLH 2022, pemuktahiran data RTLH 2021 dan verifikasi kawasan kumuh.
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun dengan target 2 dokumen yaitu dokumen Renja Tahun 2023 Renja Perubahan 2022.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Diktisar Realisasi Kinerja SKPD.	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun dengan target 1 dokumen yaitu dokumen LKJIP Tahun 2021 dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Target kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 26 Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN dan terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada TA.2022 adalah jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja 8 jenis dan terealisasi 8 jenis dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% berupa pembelian komponen instalasi listrik/alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor Disperkim Kota Balikpapan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan logistik kantor yaitu Jumlah jenis bahan Logistik kantor dengan target sebanyak 56 jenis alat tulis kantor dan jenis logistik berupa makanan dan minuman yang di tujuakan untuk konsumsi rapat, konsumsi harian pegawai dan konsumsi untuk kunjungan tamu Disperkim. Realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 56 atau dapat dikatakan memiliki capaian Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Target kinerja sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah 15 jenis barang cetakan dan penggandaan dan terealisasi hingga 31 Desember 2022 adalah sebanyak 15 jenis yang merupakan jumlah keseluruhan barang cetakan dan penggandaan yang digunakan untuk keperluan administrasi kantor Disperkim.
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Target kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah 12 jenis peralatan gedung kantor dan terealisasi sebanyak 12 jenis peralatan gedung kantor yang terdiri yang terdiri dari komputer pc spesifikasi administrasi, komputer pc spesifikasi teknis, laptop spesifikasi teknis, video conference system, kamera, printer, scanner, papan tulis, lemari arsip, brankas, televisi dan sound system dengan tingkat capaian kinerja 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Indikator kinerja sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah jenis surat menyurat dengan target 2 jenis yang merupakan pengiriman paket dokumen atau barang dan juga pembelian benda pos materai. Adapun realisasi kinerja hingga tanggal 31 Desember 2022 adalah 2 jenis dengan tingkat capaian 100 %.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;	Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu jumlah Luasan Gedung Kantor yang dipelihara dengan target 1100 m2. Indikator ini terealisasi 100%. Sub kegiatan bertujuan untuk menyediakan bahan peralatan kebersihan, jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa tenaga bantu administrasi non ASN.



Program/ Kegiatan	Faktor terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara dengan target 33 unit kendaraan baik R2 maupun R4 yang dipegang oleh perorangan maupun jabatan. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 33 unit kendaraan atau terealisasi 100%.
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara target 2 unit. Realisasi target kinerja hingga akhir Desember 2022 adalah 2 unit kendaraan.
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan target 1 pemeliharaan dan terealisasi 1 pemeliharaan gedung kantor yaitu pengecatan gedung kantor Disperkim.

Terpenuhinya target kinerja program/ Kegiatan adalah karena kemampuan PPTK dalam memahami perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta didukung oleh anggaran yang mencukupi.

### 3. Faktor kinerja program/ kegiatan yang melebihi target.

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Program Kawasan Permukiman.	Program ini memiliki sasaran untuk mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 Ha pada tahun 2026 dengan berbagi kewenangan pengurangan dengan Kementerian (Pusat) untuk pengurangan diatas 15 ha dan Provinsi Kalimantan Timur untuk pengurangan 10 -15 Ha. Berdasarkan pemetaan pada saat penyusunan Renstra Disperkim 2021-2026, kewenangan Disperkim Kota Balikpapan adalah pengurangan kawasan kumuh Kelurahan Damai seluas 5,4 Ha. Target yang ditetapkan pada tahun 2022, luasan kumuh kota Balikpapan menjadi 103,39 Ha, dan memiliki capaian kinerja 102,91%. Kinerja melebihi target karena terdapat pengurangan kumuh diatas 15 Ha yang merupakan kewenangan Pusat di realisasi sebesar 51,01 Ha dari target 48,5 Ha. Hal ini didorong oleh baiknya koordinasi antara pemegang kewenangan pengurangan kumuh yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota Balikpapan
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Target kinerja pada Renja Disperkim Tahun 2022 adalah 0,01% dari formulasi 26 peningkatan kualitas RTLH terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan sejumlah 202.539 unit (baseline Renstra Disperkim Tahun 2021-2026). Realisasi Program ini melampaui target dengan capaian 269,23 %. Kinerja melebihi target ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penginputan target program yang seharusnya 0,03% (66 peningkatan RTLH dibandingkan 202.539 unit rumah). Kinerja yang melampaui target juga dikarena adanya tambahan 4 peningkatan kualitas RTLH dari pendanaan CSR. Sehingga rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap hunian yang layak pada tahun 2022 adalah 0,03%. Keberhasilan ini juga didukung dari aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022. Aksi perubahan yang dilakukan adalah Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan (Griyaku).



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah IKM Internal Perangkat Daerah dengan target kinerja 70 dan terealisasi sebesar 77,29. Realisasi skor 77,29 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal sekretariat Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Faktor pendorong baiknya nilai IKM Internal Layanan Disperkim ini adalah karena komitmen Pimpinan dan koordinasi yang baik antar staf sekretariat Disperkim dalam perbaikan pelayanan Internal Disperkim.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Target kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Nilai hasil evaluasi SAKIP Disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat yaitu sebesar 73 dan terealisasi 74,57 dengan tingkat capaian kinerja 102,15%. Faktor pendorong kinerja melebihi target adalah karena koordinasi yang baik diantara pejabat dan staf Disperkim terkait penyusunan dokumen SAKIP Disperkim sehingga dokumen SAKIP Disperkim dinilai memadai oleh Inspektorat.
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah dengan target skor 70 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78,54 dengan tingkat capaian 112,20 %. Faktor pendorong kinerja melebihi target adalah koordinasi yang baik antara staf sekretariat (PA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Operator Gaji, Admin Ekin) Disperkim dalam perbaikan pelayanan keuangan Disperkim.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Target kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah dengan target skor 70 dan sesuai hasil IKM yang dilakukan didapat skor sebesar 78,54 dengan tingkat capaian 112,20 %. Realisasi skor 78,54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal administrasi umum Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik. Faktor pendorong baiknya nilai IKM Internal Layanan umum Disperkim ini adalah karena koordinasi yang baik antar staf umum dan kepegawainan Disperkim dalam perbaikan pelayanan umum Disperkim.
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	Indikator kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 88,57 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 125,81 %. Realisasi skor 88,57 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pengadaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi 77,12 dengan tingkat capaian 110,17 %. Realisasi skor 77,12 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal penyediaan jasa penunjang Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah adalah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan target kinerja skor IKM sebesar 70 dan terealisasi melebihi target dengan skor sebesar 73,54 atau dapat dikatakan memiliki capaian kinerja sebesar 105,06 %. Realisasi skor 73,54 ini memiliki arti bahwa mutu pelayanan internal pemeliharaan barang milik daerah Disperkim memiliki nilai B atau dikatakan berkinerja baik.
Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun;	Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun adalah jumlah rumah susun yang dikelola dengan target 4 (empat) unit rusunawa yang fisiknya dilakukan peningkatan dan pemeliharaan terealisasi pemeliharaan dan peningkatan sebanyak 6 (lima) unit rusunawa yang terdiri atas rusunawa Sepinggan I, Sepinggan II, Perusa, Sumber, Siaga dan Km 7. Capaian indikator output sub-kegiatan ini adalah 150%. faktor pendorong kinerja melampaui target adalah prioritas TAPD untuk memberikan anggaran yang dapat digunakan untuk perbaikan prasarana sarana Rusunawa dengan harapan meningkatnya kepuasan penghuni rusunawa.



Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor kinerja program/ kegiatan melebihi target
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh.	Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perumahan/pemugaran permukiman kumuh dengan target 3 (tiga) DED dan terealisasi 133,33 % dengan disusunnya 4 (empat) DED penataan kawasan kumuh Damai, Baru ilir, Karang Jati, Klandasan ilir
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;	Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target 66 unit rumah dan terealisasi peningkatan kualitas RTLH sebanyak 70 unit rumah , dimana 66 peningkatan RTLH bersumber dari dana APBD dan 4 rumah bersumber dari <i>Corporate Social Responsibilities</i> (CSR). Capaian kegiatan ini adalah 106,66%. keberhasilan ini didukung dari aksi perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022. Aksi perubahan yang dilakukan adalah Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan (Griyaku).
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah 35 kali berupa perjalanan dinas ke luar maupun dalam daerah dengan realisasi sebesar 87 kali dengan tingkat capaian 248,57%. Tingkat capaian yang melebihi 100% disebabkan karena perjalanan dinas lebih didominasi perjalanan ke dalam provinsi Kalimantan Timur sehingga biaya perjalanan dinas lebih hemat dan tidak membutuhkan waktu lama.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman pada khususnya dan tersedianya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman berdampak pada perlunya usaha yang lebih optimal dari seluruh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di tahun mendatang agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pencapaian target Renstra.

Ketidak tercapaian target kinerja tersebut juga dipengaruhi ketidak tepatan dalam penentuan target renstra/ renja sehingga menyebabkan rendahnya atau bahkan melebihi target kinerja.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
1. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi berkala di tahun berjalan agar dapat menyesuaikan pendekatan terbaik dalam pencapaian tujuan program / kegiatan .
  2. Peningkatan pemahaman perencanaan perangkat daerah ke dalam organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman agar dapat mengoptimalkan strategi /pendekatan pencapaian target kinerja. Peningkatan pemahaman perencanaan pada sumber daya yang ada di di Dinas Perumahan dan Permukiman juga di perlukan pada saat penentuan target kinerja. Ketidakpahaman terhadap perencanaan perangkat daerah, membuat penentuan target terlalu pesimis atau telalu optimis. Hal ini akan berdampak pada nilai evaluasi perencanaan perangkat daerah.
  3. Penguatan data dasar (baseline kinerja) pada perencanaan perangkat daerah dimasa mendatang. Optimalisasi anggaran hanya untuk pencapaian target kinerja dan bukan untuk hal aksesoris program/ kegiatan.



Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	-	<b>70,00</b>	<b>77,29</b>	<b>110,41</b>	<b>75,00</b>	<b>67,93</b>	<b>75,47</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP disperkim yang dikeluarkan oleh Inspektorat	80,00	-	73,00	74,57	102,15	0,00	74,57	93,21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Disperkim (Renstra dan Renja, Renja Perubahan) yang disusun	7,00	-	2,00	2,00	100,00	0,00	2,00	28,57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bkhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP (LKJIP) yang disusun	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja (evaluasi Renstra dan evaluasi Renja)	10,00	-	2,00	2,00	100,00	0,00	2,00	20,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</b>	<b>90,00</b>	-	<b>70,00</b>	<b>77,08</b>	<b>110,11</b>	<b>75,00</b>	<b>152,08</b>	<b>168,98</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	130,00	-	26,00	26,00	100,00	26,00	52,00	40,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	-	<b>70,00</b>	<b>73,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,93</b>	<b>82,14</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Bimbingan Teknis implementasi/peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	-	<b>70,00</b>	<b>78,54</b>	<b>112,20</b>	<b>75,00</b>	<b>153,54</b>	<b>170,60</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,00	-	8,00	8,00	100,00	1,00	9,00	22,50



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik kantor	280,00	-	56,00	56,00	100,00	4,00	60,00	21,43
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	75,00	-	15,00	15,00	100,00	2,00	17,00	22,67
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi	750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	195,00	-	35,00	87,00	248,57	40,00	127,00	65,13
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>	<b>70,00</b>	<b>88,07</b>	<b>125,81</b>	<b>75,00</b>	<b>163,07</b>	<b>181,19</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	12,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	25,00	-	12,00	12,00	100,00	5,00	17,00	68,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90,00</b>		<b>70,00</b>	<b>77,12</b>	<b>110,17</b>	<b>75,00</b>	<b>152,12</b>	<b>169,02</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	10,00	-	2,00	2,00	100,00	4,00	6,00	60,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,00	-	27,00	12,00	44,44	4,00	16,00	26,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	1100,00	-	1100,00	1100,00	100,00	12,00	1112,00	101,09



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5-7+9)	11 = (10/4)
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90,00</b>		<b>70,00</b>	<b>73,54</b>	<b>105,06</b>	<b>75,00</b>	<b>148,54</b>	<b>165,04</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang dipelihara	165,00	-	33,00	33,00	100,00	33,00	66,00	40,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	10,00	-	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	40,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	35,00	-	7,00	6,00	85,71	111,00	117,00	334,29
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	5,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	60,68		0,00	0,00	0,00	0,59	0	0,00
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan	100,00		11,82	11,82	100,00	0,59	12,41	12,41
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6,00	-	6,00	6,00	100,00	0,00	6,00	100,00
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5,00	-	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	20,00
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	7,00	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	28,57
	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah</b>	<b>2,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>20,77</b>
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat/ sukarelawan yang teredukasi tentang standar teknis rumah korban bencana	800,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	12,50

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah orang yang teredukasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Pengembang Perumahan yang memahami mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	250,00	-	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	20,00
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dilatih	450,00	-	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	30,00	-	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>2,84</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>20,77</b>



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang direhabilitasi	32,00	-	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	15,63
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun	12,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,33
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	40,00	-	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	25,00
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</b>	<b>81,38</b>	-	<b>66,02</b>	<b>59,05</b>	<b>89,45</b>	<b>70,83</b>	<b>129,88</b>	<b>159,60</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rumah susun yang dikelola	9,00	-	4,00	6,00	150,00	1,00	7,00	77,78
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Kamar Rusunawa yang terhunai	625,00	-	507,00	437,00	86,19	1,00	438,00	70,08

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak</b>	<b>25,00</b>		<b>7,46</b>	<b>4,39</b>	<b>58,82</b>	<b>11,84</b>	<b>16,23</b>	<b>64,90</b>
	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekomendasi siteplan	38,00	-	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00	10,53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang dilakukan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	86,00	-	86,00	86,00	100,00	1,00	87,00	101,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
	<b>Penerbitan Bertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</b>	<b>Jumlah rekomendasi teknis sarusun yang diterbitkan</b>	<b>40,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25,00</b>



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Luasan Kawasan Kumuh</b>	<b>0,00</b>		<b>103,90</b>	<b>100,88</b>	<b>102,91</b>	<b>74,40</b>	<b>81,41</b>	<b>102,91</b>
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100,00		16,67	16,67	100,00	16,67	33,34	33,34
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	6,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	75,00	-	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	13,33
	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh</b>	<b>153,00</b>		<b>49,91</b>	<b>52,42</b>	<b>105,03</b>	<b>78,90</b>	<b>131,32</b>	<b>85,83</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh yang disusun	4,00	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun	5,00	-	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	40,00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah KSM/KPP yang dibentuk dan dibina	30,00	-	6,00	6,00	100,00	6,00	12,00	40,00
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Diseminasi Informasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	36,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	120,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah /Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang disusun	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>100,00</b>		<b>26,11</b>	<b>26,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	24,00	-	3,00	4,00	133,33	1,00	5,00	20,83
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah perbaikan RTLH	288,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	34,72
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	51,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat yang diberikan Bantuan uang sewa rumah tinggal	200,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan permukiman kumuh	5,40		1,41	1,41	100,00	3,99	5,40	100,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	10,00		3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	40,00
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</b>	<b>0,12</b>		<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>269,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6,00		1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	16,67

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	252,00	-	66,00	70,00	106,06	0,00	70,00	27,78
	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama	3,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah masyarakat penerima bantuan	115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan</b>	<b>1,04</b>	-	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>99,92</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara</b>	<b>7,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>57,14</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang disusun	7,00	-	3,00	3,00	100,00	1,00	4,00	57,14
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah penyediaan PSU melalui penerbitan rekomendasi siteplan perumahan	26,00	-	10,00	3,00	30,00	3,00	6,00	23,08
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	60,00	-	12,00	12,00	100,00	1,00	13,00	21,67

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman harus didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM yang harus diacu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. SPM Perumahan Rakyat yang diampu oleh Disperkim Kota Balikpapan, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Jenis Pelayanan Dasar, terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Mutu Pelayanan Dasar, terdiri atas :
  - a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana /kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
  - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
  - d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.



- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
  - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
3. Penerima Pelayanan terdiri atas:
- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
  - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintahan terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*) dan Indikator Kinerja Hasil (IKK *Outcome*).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjabarkan bahwa Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 20 IKK *Output* dan 5 IKK *Outcome*.

Berikut dilampirkan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diampu Disperkim Kota Balikpapan pada Tahun 2022:

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	√		0	18	36	54	72	0	15	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan.	
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	√		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	0,00%	Berdasarkan hasil pendataan SPM tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang harus direlokasi akibat program Pemerintah Daerah	
3	Persentase Permukiman Layak Huni		√	99,05	99,32	99,55	99,78	100,00	99,07	99,34	Persentase permukiman layak huni sampai dengan akhir tahun 2022 telah mencapai 99,07 % dari target kinerja 99,05% dengan tingkat capaian kinerja 100,02 %. Disperkim Kota Balikpapan memiliki kewenangan mengurangi kawasan kumuh seluas 5,4 Ha. Luasan tersebut ditangani sebesar 1,41 Ha pada tahun 2022. Disperkim Kota Balikpapan juga berhasil mengupayakan dan mengkoordinasikan penanganan kawasan kumuh dengan KOTAKU dengan pendanaan diluar APBD Kota Balikpapan seluas 51,01 Ha.	



No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		√	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,00	0,01	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus difasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan disediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
5	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU		√	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	21,97	21,97	Realisasi indikator sasaran ini adalah sebesar 21,97% . Pencapaian ini didukung oleh peningkatan iklim investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang berpengaruh terhadap bertumbuhnya sektor perumahan dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap rumah yang terfasilitasi PSU
6	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh		√	32,56	51,47	67,78	84,08	100,00	34,19	53,11	Target Penanganan kumuh ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Kotaku untuk luasan kumuh diatas 15 Ha, Pemerintah Provinsi untuk luasan kumuh 10 Ha- 15 Ha, dan penanganan melalui dana APBD Kota untuk luasan kumuh dibawah 10 Ha. Pada akhir tahun 2022 telah tertangani 52,42 Ha kawasan kumuh dengan penangan oleh Kotaku seluas 51,01 Ha dan penanganan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai , Kecamatan Balikpapan Kota. Realisasi melebihi target untuk penangan luasan kumuh oleh Pemerintah Pusat yang awalnya pada akhir Tahun 2022 di ramalkan hanya seluas 48,5 Ha ternyata terealisasi 51,01 Ha

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		√	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,00	0,01	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kota yang di tangani		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sesuai pendataan SPM Tahun 2022, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
9	berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)		√	26,11	100,00	0,00	0,00	0,00	26,11	100,00	Penanganan kawasan kumuh Kota Balikpapan melalui APBD Kota Balikpapan seluas 1,41 Ha di RT. 4 Kelurahan Damai
10	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,003	0,002	Terjadi Updating data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku. Sehingga ketidaktercapaian target bukan berasal menurunnya jumlah penanganan melainkan dari adanya updating data RTLH eksisting
11	jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		√	16,75	16,80	16,85	16,90	16,95	21,97	21,97	Target penambahan unit rumah yang dilengkapi PSU adalah sebesar 93 unit rumah namun berdasarkan pendataan total unit rumah yang dilengkapi PSU adalah menjadi 44.507 unit rumah terhadap jumlah rumah di Kota



No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Balikpapan.
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		√	0	18	36	54	72	0	15	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	59,00	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	223	Terdiri dari rumah longsor dan angin puting beliung
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0	20	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	sesuai pendataan SPM Tahun 2022

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
19	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	157	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
20	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	sesuai pendataan SPM Tahun 2022
21	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Tidak ada kegiatan fasilitasi ganti hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	3	Lokasi 3KK berada di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat



No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		√	0	0	0	0	0	0	33	tidak terdapat kegiatan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2022
25	Jumlah rumah tangga penerima layanan belum mendapatkan penyediaan rumah pemenuhan SPM layak huni berdasarkan rencana		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	59	Lokasi 74KK tersebar di 23 Kelurahan dan 6 Kecamatan. Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah yang harus di fasilitasi dan di muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 direncanakan rumah yang terkena bencana alam akan menjadi 59 unit akan di sediakan rumah layak huni sebanyak 15 rumah.
26	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		√	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0	tidak terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk relokasi tahun 2022
27	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		√	3,99	0,00				26,11	0	Berdasarkan SK Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020
28	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		√	26,00	355,00	251,00	499,00	389,00	70	100	Telah dilakukan sebanyak 66 unit RTLH dana APBD dan 4 unit dana CSR melalui program ORIYAKU Balikpapan
29	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		√	49,91	78,90	103,90	128,90	153,30	12,82	56,98	Dilakukan penanganan kumuh di Kelurahan Gunung Sari Ulu seluas 11,41 Ha melalui KOTAKU dan Kelurahan Damai seluas 1,41 Ha
30	Jumlah rumah di kab/kota		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539		Jumlah rumah formal dan swadaya tahun 2022 dari pendataan RP3KP tahun 2022
31	Jumlah unit PK RTLH		√	26	355	251	499	389	70	100	66 unit RTLH bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR pada tahun 2022.
32	Jumlah rumah tidak layak huni		√	5565	5210	4959	4460	4071	517	417	66 unit RTLH bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR pada tahun 2022.

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisa
		standar nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Jumlah rumah yang tidak dihuni		√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	Belum dilakukan pendataan
34	Rasio rumah dan KK		√	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202539-243852		
35	Jumlah rumah pembangunan baru		√	13176	18176	23176	28176	33176	251		92 Rumah Swadaya, 159 Rumah Formal
36	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		√	35524	37300	39165	41123	43179	44507		
37	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		√	22245	43145	48873	53760	59136	115049		Data sambungan PDAM tahun 2022
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022
39	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		√	0	0	0	0	0	0	0	Kewenangan SPM Akses Sanitasi (On Site/Off Site) Tahun 2022 sudah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
40	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		√	0	0	0	0	0	37	37	
41	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		√	0	0	0	0	0	202539		Jumlah rumah eksisting Kota Balikpapan tahun 2022
42	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang yang tersertifikasi di tahun 2022
43	Jumlah pengembang yang terregistrasi		√	122	122	122	122	122	0	0	Tidak ada pengembang yang yang terregistrasi di tahun 2022 karena TIM SRP2 belum terbentuk
44	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		√	50	50	50	50	50	51	50	Sosialisasi penyerahan PSU dan sosialisasi permohonan bantuan PSU
45	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		√	0	0	0	0	0	0	157	Tahun 2022 Kegiatan hanya berupa pendataan. Penyediaan rumah korban bencana mulai dilakukan tahun 2023. Berdasarkan pendataan Tahun 2022 terdapat 74 unit rumah ( 223 warga negara) yang harus di fasilitasi dan di



No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											muat dan dipetakan selama 5 tahun dalam Rencana Aksi Daerah SPM Kota Balikpapan.
46	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		√	0	0	0	0	0	0	0	sesuai pendataan SPM Tahun 2022, tidak terdapat masyarakat yang harus direlokasi
47	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		√	2,75	2,57	2,45	2,22	2,01	0,26	0,26	Terjadi Updating data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku.
48	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		√	97,25	97,43	97,55	97,88	97,99	99,74	99,79	Terjadi Updating data RTLH pada tahun 2022, pada saat penyusunan Renstra jumlah RTLH sebanyak 5591 dan pada 2022 terverifikasi menjadi sebanyak 583 RTLH. Dari 583 unit tersebut kemudian ditangani sebanyak 66 unit RTLH yang bersumber dari APBD dan 4 bersumber dari CSR yang merupakan usulan baru dari masyarakat melalui inovasi Griyaku.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

### 2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Disperkim Kota Balikpapan didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Disperkim Kota Balikpapan dalam dokumen perjanjian kinerja revisi pada tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Disperkim Tahun 2021 – 2026. Secara rata-rata, capaian kinerja pelayanan Disperkim Kota Balikpapan adalah sebesar 113,25 % atau masuk dalam predikat sangat tinggi. Berikut disajikan rincian capaian Kinerja Pelayanan Disperkim Kota Balikpapan tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Persen	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	Persen	16,75	21,97	131,19	Sangat Tinggi
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Persen	32,56	34,19	105,02	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Skor	27	31,53	116,78	Sangat Tinggi

Dalam Pencapaian kinerja pembangunan tahun 2022, Disperkim merangkul pemangku kepentingan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan untuk berkolaborasi. Sinergi kolaborasi yang dilakukan antara Disperkim dan pemangku kepentingan diantaranya ada pada hal sebagai berikut:

1. Program GRIYAKU Balikpapan;



2. Tata Kelola Siteplan Perumahan;
3. Konsolidasi Tanah Eks Kebakaran Permukiman Pandansari;
4. Penguatan Regulasi (PKP, RP3KP, RP2KPKPK dan Penyerahan PSU).

### 2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Disperkim Kota Balikpapan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 adalah pencapaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan terkait pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat belum dapat tercapai atau dapat dikatakan capaian kinerja Nol (0). Capaian Kinerja ini menjadi 0 dikarenakan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Meningkatnya cakupan rumah layak huni dan indikator Program Pengembangan Perumahan merupakan hasil dari perhitungan realisasi penyediaan rumah layak huni melalui rehabilitasi rumah korban bencana ataupun pembangunan baru bagi rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah. Masing -masing formulasi adalah sebagai berikut;

- o Formulasi IKU Meningkatnya cakupan rumah layak huni :

$$\text{Persentase rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kota Balikpapan}} \times 100 \%$$

- o Formulasi Indikator Program Pengembangan Perumahan, Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota:

$$\text{Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota} = \frac{\text{Rumah tangga korban bencana yang ditangani+ Rumah Tangga yang di relokasi program pemerintah}}{\text{Jumlah total rumah tangga yang harus direlokasi karena program Pemerintah Daerah dan korban bencana yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100 \%$$

Ketiadaan realisasi penanganan rumah korban bencana atau relokasi program dikarenakan pada Tahun 2022, kegiatan pemenuhan SPM hanya berupa pendataan BNBA untuk pelaksanaan SPM mulai Tahun 2023 sampai dengan 2026. Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan SPM, maka seharusnya pendataan SPM BNBA dilakukan pada tahun  $n-1$  yaitu pada Tahun 2021, namun dikarenakan kurang optimalnya pendataan dan kurangnya pemahaman SDM terhadap alur pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat sehingga berdampak pada Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan penyediaan fisik rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah dan capaian kinerja menjadi Nol (0).

### **2.3.3. Dampak Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional**

Sebagai hasil evaluasi pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat, maka seharusnya pendataan SPM BNBA dilakukan pada tahun  $n-1$  yaitu pada Tahun 2021, namun dikarenakan kurang optimalnya pendataan dan kurangnya pemahaman SDM terhadap alur pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat sehingga berdampak pada Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan penyediaan fisik rumah korban bencana dan atau relokasi program pemerintah dan capaian kinerja menjadi Nol (0).

Pencapaian kinerja sebesar Nol (0), namun realisasi anggaran pada program tersebut mampu mencapai capaian kinerja masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di dalam cakupan IKU maupun indikator program, sehingga realisasi anggaran tidak dapat dikatakan pemborosan karena tidak memenuhi kinerja sasaran maupun program terkait.

Sebagai bahan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan SPM Perumahan Rakyat telah ditingkatkan di Tahun 2022 dan data BNBA korban bencana juga telah dipetakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

### **2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Tahun 2021 - 2026, terdapat implikasi terhadap pelayanan Disperkim untuk lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang terhadap pelayanan tersebut adalah sebagai berikut ;

**TANTANGAN :**

1. Kebutuhan Perumahan untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN)
2. Meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan layak huni sebagai implikasi dari peningkatan laju urbanisasi.
3. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian bantuan PSU di kota Balikpapan.
4. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman yang akurat dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*Stakeholders*)

**PELUANG :**

1. Program Nawacita kedua
2. Program Sejuta Rumah
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Kolaborasi Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kolaborasi Pemberian Bantuan PSU Perumahan dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Provinsi Kalimantan Timur.

**2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021- 2026 dan juga kebutuhan terkait urusan Perumahan Rakyat



dan Kawasan Permukiman, maka isu strategis yang masih harus ditindaklanjuti dalam Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kawasan kumuh seluas 153,30 Ha di Kota Balikpapan. Pada Tahun 2024 direncanakan kawasan kumuh yang tersisa masih 74,40 Ha dan diupayakan pada akhir Tahun 2024 menjadi 49,40 Ha.
2. Masih terdapat 5.580 rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan. Data pada dokumen Renstra Balikpapan Tahun 2021 -2026 belum masuk tahap verifikasi akhir. Seiring dinamisasi pendataan yang dilakukan dan peningkatan kualitas RTLH setiap tahun , maka pada akhir tahun 2022 data RTLH eksisting adalah sebesar 517 unit RTLH. Direncanakan pada tahun 2023 akan berkurang Kembali 100 unit melalui pendanaan APBD, sehingga pada tahun 2024 percepatan pengurangan RTLH akan dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 250 unit. Kondisi akhir yang diinginkan pada Tahun 2024 adalah tersisa RTLH sebanyak 167 unit RTLH.
3. Semakin meningkatnya kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau, terlebih sebagai penyangga IKN. Disperkim Kota Balikpapan dalam hal ini akan memfasilitasi kemudahan dalam penyediaan rumah layak huni diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Penyempurnaan tata kelola rencana tapak perumahan dalam rangka memperbaiki dan mempermudah permohonan rekomendasi rencana tapak perumahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar pengembang perumahan benar -benar menyediakan rumah beserta PSU sesuai dengan aturan berlaku.
  - b. Sosialisasi dan fasilitasi kemudahan memperoleh hunian layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui mekanisme Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dan penyediaan hunian layak untuk MBR di sembilan (9) lokasi rusunawa Balikpapan yang responsif Gender.
  - c. Penyediaan rumah layak huni melalui rehabilitasi dan pembangunan rumah baru bagi korban bencana dan atau relokasi program pemerintah. Penyediaan rumah layak huni jenis ini merupakan SPM Perumahan Rakyat, Sesuai Rencana aksi SPM

Pemerintah Kota Balikpapan, penyediaan ini akan dimulai di Tahun 2023 dan berlanjut di tahun 2024 sampai dengan akhir Renstra Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Hal ini merupakan rencana optimalisasi penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan.

- d. Kemudahan penyediaan rumah layak huni juga diberikan untuk jenis rumah vertikal dimana, Disperkim Kota Balikpapan memfasilitasi penerbitan rekomendasi Pertelaan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Hal ini agar Sarusun Kota Balikpapan yang terbangun telah memenuhi aturan yang berlaku.
4. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman yang akurat. Mulai tahun 2022 akan dibangun Sistem Informasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SIM PKP). Tahun 2022 diinisiasi dengan penyusunan masterdata perumahan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Tahun 2023 berupa pengembangan SIM PKP yang dilanjutkan di Tahun 2024 hingga ke akhir Tahun Renstra.
5. Realisasi sasaran Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diwakili oleh Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan telah optimal dicapai pada Tahun 2022. Ketercapaian ini dalam realitasnya tetap membutuhkan pengawasan dan pengendalian, sehingga kinerja yang dicapai bukan hanya angka semata namun juga dapat mencerminkan kualitas kinerja IKU tersebut. Dari pengawasan dan pengendalian terhadap PSU perumahan maka hal yang perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti di Tahun 2023 maupun perencanaan 2024 adalah percepatan penyerahan PSU perumahan. Untuk PSU perumahan yang telah diserahkan, isu strategisnya adalah peningkatan dan pemeliharaan PSU, terutama PSU RTH yang berupa taman -taman didalam cakupan klaster perumahan yang PSU nya sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Pada perencanaan Tahun 2024 direncanakan penyediaan/peningkatan/pemeliharaan PSU taman klaster perumahan yang responsif gender.

---

#### **2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal renja Disperkim Kota Balikpapan disusun sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024, sebagaimana terlampir.



Tabel 2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	80	13,400,932,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	IKM Internal Perangkat Daerah	80	13,400,932,000	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	76	30,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan	76	30,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	10,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	10,000,000	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>7,299,769,177</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>7,299,769,177</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	7,299,769,177	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45	7,299,769,177	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>477,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>477,000,000</b>	
	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45	27,000,000	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45	27,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	450,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balikpapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	450,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>799,162,823</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80</b>	<b>799,162,823</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	17,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	369,962,823	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	369,962,823	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	105,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	105,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	320	7,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	320	7,200,000	



NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	250,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50,000,000	
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>325,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Balikpapan	<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>325,000,000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	75,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	75,000,000	
	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	50,000,000	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	50,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	200,000,000	
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>925,000,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>925,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	825,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	825,000,000	
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>3,545,000,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80</b>	<b>3,545,000,000</b>	

NO	2024					2024					
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	350,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	120,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	75,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	75,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3,000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3,000,000,000	



NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Balikpapan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	28.00 %	10,885,000,000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Balikpapan	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	28.00 %	10,885,000,000	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehsbilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.89 %	225,000,000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.89 %	225,000,000	

NO	2024					2024				Catatan Penting	
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100,000,000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100,000,000	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	75,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	75,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RHPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	50,000,000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	50,000,000	
2.2	Sosialisasi dan Peralapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	32.89 %	410,000,000	Sosialisasi dan Peralapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	32.89 %	410,000,000	



NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	50,000,000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Balikpapan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	200	50,000,000	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Balikpapan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100	150,000,000	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Balikpapan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	100	150,000,000	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100	150,000,000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Balikpapan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	100	150,000,000	

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	60,000,000	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	60,000,000	
2.3	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>28.00 %</b>	<b>2,900,000,000</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Balikpapan</b>	<b>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>28.00 %</b>	<b>2,900,000,000</b>	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	35	800,000,000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terrehabilitasi	35	800,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RMPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100,000,000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Balikpapan	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	100,000,000	
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	2,000,000,000	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Balikpapan	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1	2,000,000,000	
2.4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	78.65 %	6,500,000,000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	78.65 %	6,500,000,000	



No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	4,500,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	4,500,000,000	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	2,000,000,000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Balikpapan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	2,000,000,000	
2.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	13.16 %	800,000,000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	13.16 %	800,000,000	

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7	50,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Balikpapan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7	50,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	650,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	650,000,000	

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RMPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	100,000,000	
2.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	3	50,000,000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikpapan	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	3	50,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1	50,000,000	
3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Balikpapan	Luasan Kawasan kumuh	25.42	9,700,000,000	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Balikpapan	Luasan Kawasan kumuh	25.42	9,700,000,000	



NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
3.1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Balikpapan	<b>Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman</b>	<b>50.00 %</b>	<b>875,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Balikpapan	<b>Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman</b>	<b>50.00 %</b>	<b>875,000,000</b>	
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	500,000,000	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	500,000,000	

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	375,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	375,000,000	
3.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikipap an	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	127.88	620,000,000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Balikipap an	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	127.88	620,000,000	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	370,000,000	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	370,000,000	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1	100,000,000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Balikipap an	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1	100,000,000	

No	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	100,000,000	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	100,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50,000,000	
3.3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Balikpapan	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>42.44 %</b>	<b>8,205,000,000</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Balikpapan	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</b>	<b>42.44 %</b>	<b>8,205,000,000</b>	



NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3	300,000,000	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	3	300,000,000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250	6,710,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	250	6,710,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	50,000,000	

NO	2024				2024				Catatan Penting		
	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1	45,000,000	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1	45,000,000	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	11.08	1,100,000,000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Balikpapan	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	11.08	1,100,000,000	
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Balikpapan	<b>Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan</b>	<b>5.12%</b>	<b>1,750,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Balikpapan	<b>Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan</b>	<b>5.12%</b>	<b>1,750,000,000</b>	
4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	1,750,000,000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	1	1,750,000,000	

NO	2024					2024					Catatan Penting
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	200,000,000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	200,000,000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia	Balikpapan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	1,400,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia	Balikpapan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	1,400,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	150,000,000	
				<b>TOTAL</b>	<b>35,735,932,000</b>					<b>TOTAL</b>	<b>35,735,932,000</b>



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada rancangan awal Renja Dinas Perumahan dan Permukiman ini belum terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

**BAB. III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya. Dalam cakupan Undang – undang tersebut, secara operasional bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tercantum dalam urusan wajib pembangunan nasional.

Selain merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 juga merujuk pada sasaran strategis ke 3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yakni **“Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”**

**Tabel 3. Pembagian Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota
1	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha.
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
4	Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	a. Penyelenggaraan PSU Perumahan
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	a. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana , sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan Disperkim Kota Balikpapan , sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 adalah Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Tujuan Disperkim ini merupakan salah satu sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026.

Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks kepuasan layanan infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Indeks kepuasan layanan infrastruktur didukung oleh indikator yang dihasilkan oleh Disperkim Kota Balikpapan, yaitu indikator tujuan persentase permukiman layak huni. Pada Tahun 2024, indikator tujuan memiliki target ini adalah 99,50 %.

#### **3.2.2 Sasaran**

Upaya pencapaian tujuan Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2021 -2026 , didukung oleh beberapa sasaran, yaitu:



1. Meningkatnya cakupan rumah layak huni. Sasaran ini Mengukur persentase rumah layak huni yang disediakan, difasilitasi oleh kota Balikpapan melalui penyediaan rumah korban bencana, rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program terhadap jumlah rumah di Kota Balikpapan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase rumah layak huni. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 0,02 %.
2. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai. Sasaran ini mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Sasaran ini diwakilkan oleh indikator Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Unit Rumah adalah jumlah unit rumah di dalam perumahan formal diukur dengan Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 16,85 %.
3. Mengurangi luas kawasan kumuh. Sasaran ini mengukur persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sesuai dengan SK Luas Kumuh Kota Balikpapan Tahun 2020 seluas 153, 3 Ha. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah 67,78 %.
4. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim. Sasaran ini diukur dengan melaksanakan penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) di unit kerja Disperkim. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sasaran ini memiliki indikator Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim. Pada Tahun 2024 sasaran IKU ini adalah nilai 30,50

**Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,05%	99,32%	99,50%	99,78%	100%

1.1	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
1.2	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai.	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	16,70%	16,75%	16,80%	16,85%	16,90%	16,95%
1.3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	0,00%	32,56%	51,47%	67,78%	84,08%	100%
1.4	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	NA	27	28,75	30,50	32,25	34

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan di tahun 2024 , Dinas Perumahan dan Permukiman mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan rancangan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 , Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 merujuk pada tema pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024 yaitu Mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif. Program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan masuk ke misi ke tiga (3) RPJMD Tahun 2021 - 2026 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai"**

b. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024 juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Target TPB yang diampu dan menjadi salah satu indikator program pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Target 11.1 yaitu Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.1 TPB memiliki indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Pengentasan Kemiskinan.

Salah satu tujuan program dan kegiatan Disperkim Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung tujuan pengentasan kemiskinan ini terdapat perbaikan rumah tidak layak huni dan juga pemberian kemudahan akses perumahan bagi MBR.

- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terintegrasi dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

- e. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 terdiri atas 4 Program, 14 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan. Berikut disajikan rencana program dan kegiatan Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024.





NO	KODE	URUSAN / BIDANG GELIAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET MEND PERIODE RESTR 2011	REALISASI CAPAIAN REKOR DPT TAHUN 2011	PROGRAM CAPAIAN TARGET REKOR DPT TAHUN 2011	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKARIBLAU BENCANA TAHUN 2011		PENGANGKUT JARAH TENAGA KERJA	
							TARGET 2011	PANGUNGKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PANGUNGKATIF (Rp)		
											12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah korban jiwa dan kerusakan lingkungan	0		0	0	10.000.000.000	Sisa Belanja Gubernur Kecamatan Tanjung Pinang	REKOR DPT KORUS (Rp)		4 Pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah KORUS yang terdapat		11.000.000	10.000.000.000	0	0
1.34.01.2.01		Bantuan teknis penanganan kebakaran						1.000.000.000.000						40 Ditanggung	7.000.000.000.000		
1.34.01.2.01.01		Pengadaan Sarana dan Prasarana															
			Jumlah orang yang meninggal akibat kebakaran	0		0	40 Ditanggung	1.000.000.000.000	Sisa Belanja Gubernur Kecamatan Tanjung Pinang	REKOR DPT KORUS (Rp)		4 Pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah KORUS yang terdapat		40 Ditanggung	7.000.000.000.000	0	0
1.34.01.2.01		Bantuan teknis penanganan kebakaran						400.000.000.000						40 Ditanggung	0.000		
1.34.01.2.01.02		Pengadaan Sarana dan Prasarana															
			Jumlah orang yang meninggal akibat kebakaran	0		0	40 Ditanggung	27.000.000.000	Sisa Belanja Gubernur Kecamatan Tanjung Pinang	REKOR DPT KORUS (Rp)		4 Pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah KORUS yang terdapat		40 Ditanggung	0.000	0	0
1.34.01.2.01.01		Bantuan teknis penanganan kebakaran															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA REKORDE BENDYER OPD	REALISASI CAPAIAN REKORDE REKORDE TAHUN 2021	PERAGAN CAPAIAN TARGET REKORDE OPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERAGAN NILAI RENCANA TAHUN 2021		PERANGKAT SASARAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET JILAT	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan "Tesis Independen Penelitian Perundang-undangan"	Orang		Orang	45 Orang	450.000.000,00	Kota Bekasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Selatan	PERENCANAAN ASLI-DANREVISI (PAD)		4 Peningkatan efektivitas usaha mendukung pengembangan per ekonomi dan pelayanan masyarakat Meliputi a. Peningkatan ke-efektifan dan yang berkualitas		45 Orang	0,00	ORANG PERILAKU DAN PERUBAHAN
1.04.01.2.05		Indikator Kinerja Perangkat Daerah						749.100.000,00						1 Paket	949.000.000,00	
1.04.01.2.05.01	Penyediaan Anggaran Kinerja Luaran Peningkatan Berbasis Kinerja															
			Jumlah Paket Rancangan Antrian Layanan Peningkatan Berbasis Kinerja yang Diselesaikan	Paket		Paket	1 Paket	11.000.000,00	Kota Bekasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Selatan	PERENCANAAN ASLI-DANREVISI (PAD)		4 Peningkatan efektivitas usaha mendukung pengembangan per ekonomi dan pelayanan masyarakat Meliputi a. Peningkatan ke-efektifan dan yang berkualitas		1 Paket	11.000.000,00	ORANG PERILAKU DAN PERUBAHAN
1.04.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dipecahkan	Paket		Paket	1 Paket	900.000.000,00	Kota Bekasi Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang Selatan	PERENCANAAN ASLI-DANREVISI (PAD)		4 Peningkatan efektivitas usaha mendukung pengembangan per ekonomi dan pelayanan masyarakat Meliputi a. Peningkatan ke-efektifan dan yang berkualitas		1 Paket	910.000.000,00	ORANG PERILAKU DAN PERUBAHAN
1.04.01.2.05.05	Penyediaan Biaya Cetak dan Pengiriman															



NO	KODE	URUSAN / BOKAL URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PEKERJAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SADARAN	PEKERJAAN BALIK RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DASAR PENUNJANG JABAT
							TARGET 2024	FASILITASI (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	FASILITASI (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Strategis (PKS)	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00	Akuisi Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis Kabupaten	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)	4	Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten		30 Dokumen	50.000.000,00	STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN
	1.04.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku urusan Perencanaan Daerah						50.000.000,00						1.04.01	50.000.000,00	
1.04.01.2.01.01 Pengadaan Perencanaan Perencanaan Daerah dan Perencanaan Daerah Lainnya																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten yang Disahkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Akuisi Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis Kabupaten	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)	4	Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten		1.04.01	75.000.000,00	STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN
	1.04.01.2.01.01	Pengadaan Mekanisme												1.04.01	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja Strategis	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Akuisi Perencanaan Strategis Perencanaan Strategis Kabupaten	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)	4	Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten Perencanaan Kerja Strategis Kabupaten		2.04.01	50.000.000,00	STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN
	1.04.01.2.01.01	Pengadaan Perencanaan dan Mekanisme												2.04.01	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BOKS URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANAK PERSEK KEVETRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKOR OPD TAHUN 2022	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET REKOR OPD TAHUN 2023	CAPAIAN ANAK DAN KEMAJUAN PENDIDIKAN					KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN BAKU SAHUKRA TAHUN 2023		PERANGKAT LUNAK PERANGKAT JENIS		
							TARGET REKOR	PENCAPAIAN REKOR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PENCAPAIAN REKOR (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			jumlah anak Persekolahan dan Sekolah Dasar yang Disalurkan	1000		1000	1000.000.000,00	-	Sekolah Sarana Kependidikan Sarana Kesehatan	PENCAPAIAN REKOR OPD (Rp)	1	1	1000	1000.000.000,00	1000	1000.000.000,00	URUSAN PERSEKOLAHAN DAN PENDIDIKAN
	1.04.01.2.04	Pencapaian Jasa Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar					100.000.000,00						1	1000	1.000.000.000,00		
	1.04.01.2.04.01	Pencapaian jasa Pendidikan Dasar dan Dasar dan Dasar															
			jumlah anak dan Persekolahan dan Persekolahan. Sumber Daya dan Anak yang Disalurkan	1000000		1000000	100.000.000,00	-	Sekolah Sarana Kependidikan Sarana Kesehatan	PENCAPAIAN REKOR OPD (Rp)	1	1	1000000	100.000.000,00	1000000	100.000.000,00	URUSAN PERSEKOLAHAN DAN PENDIDIKAN
	1.04.01.2.04.02	Pencapaian jasa Pelayanan Umum Negeri											1	1000000	1.000.000.000,00		
	1.04.01.2.04.03	Pencapaian jasa Pelayanan Umum Negeri yang Disalurkan											1	1000000	1.000.000.000,00		
	1.04.01.2.04.04	Pencapaian Belajar Mula Dasar Pemenuhan Umum Kebutuhan Dasar					1.000.000.000,00						1000000	1.000.000.000,00			
	1.04.01.2.04.05	Pencapaian jasa Pendidikan Dasar Pendidikan dan Target Pendidikan Persekolahan dan dan Pendidikan Dasar dan Dasar															















NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI DPO	REALISASI CAPAIAN REKORD DPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REKORD DPO TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BILU BENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT SASARAN PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah On-Off Road Accident Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Sakit Bencana Kabupaten Bantul yang Terkena Rencana Program Kabupaten Bantul	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-Rusi Berkas Sertifikat Kecelakaan Sertifikat Sertifikat Sertifikat	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)		6 Penggunaan efektifitas untuk mendukung pengembangan gizi ekonomi dan pengembangan pasar Masyarakat di Kecamatan di tingkat Kor yang berkualitas		1 Dokumen	100.000.000,00	URUG PERLOMBAK DAN POTANSI BANTU
1.04.02.2.05.01		Pengembangan infrastruktur Pengembangan Rumah bagi Rumah Bencana														
			Luas lahan yang Terselesa untuk pengembangan rumah bagi korban Bencana Kabupaten Bantul	Ha		Ha	1 Ha	2.000.000.000,00	-Rusi Berkas Sertifikat Kecelakaan Sertifikat Sertifikat	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)		6 Penggunaan efektifitas untuk mendukung pengembangan gizi ekonomi dan pengembangan pasar Masyarakat di Kecamatan di tingkat Kor yang berkualitas		1 Ha	2.000.000.000,00	URUG PERLOMBAK DAN POTANSI BANTU
1.04.02.2.05.02		Pembinaan Pengendalian Rumah Suci di Seluruh Daerah Kabupaten Bantul						5.000.000.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
1.04.02.2.05.03		Fasilitas Pengawasan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Rumah Suci														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengawasan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan di Rumah Suci Kabupaten Bantul	Laporan		Laporan	1 Laporan	4.000.000.000,00	-Rusi Berkas Sertifikat Kecelakaan Sertifikat Sertifikat	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)		6 Penggunaan efektifitas untuk mendukung pengembangan gizi ekonomi dan pengembangan pasar Masyarakat di Kecamatan di tingkat Kor yang berkualitas		1 Laporan	100.000.000,00	URUG PERLOMBAK DAN POTANSI BANTU
1.04.02.2.05.04		Pembinaan Pemeliharaan Rumah Suci di Seluruh Daerah Kabupaten Bantul														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKARSA CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERUBAHAN WAKU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT SASARAN / PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											REGIONAL	NASIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Pemantauan/Pantau dan Umpan Balik dari Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ALOKASI DAERAH (PAD)		4		1 Dokumen	0.000.000.000,00	DINAS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBUDAYAAN
1.04.02.2.00		Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan						800.000.000,00						7 Dokumen	2.100.000.000,00	
1.04.02.2.00.01		Fasilitas Pemertaaan Kualitas Perumahan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan, Teknologi Sistem Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pemilik, Pengembang/Pemilik, dan Perumahan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan, Teknologi Sistem Elektronik	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ALOKASI DAERAH (PAD)		4		7 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBUDAYAAN
1.04.02.2.00.02		Kualitas dan Sistemasi Pengembangan Perumahan dan Pengembangan Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Sistemasi Pengembangan Perumahan dan Pengembangan Perumahan	Laporan		Laporan	7 Laporan	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ALOKASI DAERAH (PAD)		4		7 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KEBUDAYAAN
1.04.02.2.00.04		Kualitas dan Sistemasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau dengan Badan Usaha (PT/BLU), Perumahan dan Pengembangan Perumahan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGATAN / SUB KEGATAN	TARGET BAGI PERIODE RENTAN OPD	REKUISISI CAPAIAN REKUISI REKUISI OPD TAHUN 2023	PEKERJAAN CAPAIAN TANPA REKUISI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA SAS KORANGKA PENGADAAN						NOMOR SAS/BAK	PEKERJAAN BAKU BENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT SADRAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	RAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	RAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan komunikasi yang disampaikan kepada Pemangku Daerah dengan Badan Usaha (PT/UD) Perumahan untuk Runtan Susah Lurus	Laporan	Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sukoharjo Sarana Perumahan Sarana Susah Lurus	PENDAPATAN PADILINDA/DAK (DNC)		1. Peningkatan jumlah pengembalian dari pemangku daerah yang disampaikan kepada Pemangku Daerah yang berkepentingan		1 Laporan	50.000.000,00	(K)K/PT/UD/BAK/DAK/PT/UD/BAK/DAK	
1.04.02.2.01		Perbaikan Sarana Perumahan Susah Lurus (SLSL)					50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00		
1.04.02.2.01	Kendaraan dan Sarana Perbaikan Sarana Perumahan Susah Lurus (SLSL)															
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan komunikasi yang disampaikan kepada Pemangku Daerah dengan Badan Usaha (PT/UD) Perumahan untuk Runtan Susah Lurus	Laporan	Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sukoharjo Sarana Perumahan Sarana Susah Lurus	PENDAPATAN PADILINDA/DAK (DNC)		1. Peningkatan jumlah pengembalian dari pemangku daerah yang disampaikan kepada Pemangku Daerah yang berkepentingan		1 Laporan	50.000.000,00	(K)K/PT/UD/BAK/DAK/PT/UD/BAK/DAK	
1.04.02		PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN					5.700.000.000,00							5.700.000.000,00		
1.04.02.2.01		Perbaikan dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan					570.000.000,00						1 Laporan	500.000.000,00		
1.04.02.2.01	Perbaikan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Perumahan															
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan komunikasi yang disampaikan kepada Pemangku Daerah dengan Badan Usaha (PT/UD) Perumahan untuk Runtan Susah Lurus	Laporan	Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	Kab. Sukoharjo Sarana Perumahan Sarana Susah Lurus	PENDAPATAN PADILINDA/DAK (DNC)		1. Peningkatan jumlah pengembalian dari pemangku daerah yang disampaikan kepada Pemangku Daerah yang berkepentingan		1 Laporan	500.000.000,00	(K)K/PT/UD/BAK/DAK/PT/UD/BAK/DAK	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRADA OPD TAHUN 2022	PERAKSIAN CAPAIAN TARGET REALISASI OPD TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGGA PENDANAAN						KELOMPOK SATAPAN	PERAKSIAN BILAU KERTAMA TAHUN 2022		PELAKSANA SADANG PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PROG INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PROG INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kendali Mutu Perencanaan Pusat Penyelidikan Tumbuhan dan Biologi Kelangkaan Persempitan Kuching	Laporan	Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Belagaung Sarawak Persempitan Sarawak (Kuching)	PERUSAHAAN KUCING (KUCING)		4	4		1 Laporan	100.000.000,00	DR. YUSUF MANSUR DAN PUSAT KUCING
1.44.02.2.00.00			Kendali Mutu Perencanaan Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													
			Jumlah Laporan-Isi Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching	Laporan	Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Belagaung Sarawak Persempitan Sarawak (Kuching)	PERUSAHAAN KUCING (KUCING)		4	4		1 Laporan	50.000.000,00	DR. YUSUF MANSUR DAN PUSAT KUCING
1.44.02.2.00			Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													
1.44.02.2.00.00			Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													
1.44.02.2.00.00			Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													
			Jumlah Laporan Teknik-Isi Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching	Laporan	Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	Kota Belagaung Sarawak Persempitan Sarawak (Kuching)	PERUSAHAAN KUCING (KUCING)		4	4		1 Laporan	500.000.000,00	DR. YUSUF MANSUR DAN PUSAT KUCING
1.44.02.2.00.00			Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													
1.44.02.2.00.00			Kendali Mutu Persempitan Persempitan Persempitan Persempitan Kuching													







NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AJIB PERIODE REKSTRAS OPD	REALISASI CAPAIAN REKSTRAS OPD TAHUN 2022	PERAKSIAN CAPAIAN TARGET REKSTRAS OPD TAHUN 2023	CAPAIAN AKHIR DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergi dengan lembaga Penyelidikan Pasar dan Jasa Utama Untuk Perumahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-RUMAH KONDISI SANTIAK KAWASAN SANTIAK KAWASAN	PENYEMPATAN AKU DARI (PND)	-	4 Peningkatan Efektivitas dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pemerataan sumber daya manusia di kawasan yang terdampak		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERKOTAAN
J U M L A H								100.000.000,00							100.000.000,00	



## **BAB. IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Kerja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

## BAB. V

### INOVASI PERANGKAT DAERAH

Tuntutan pencapaian kinerja perangkat daerah dari para *stakeholders* tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dibutuhkan strategi yang matang serta dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam rangka pencapaian kinerja tersebut. Pencapaian kinerja yang tercermin dalam indikator -indikator keberhasilan perangkat daerah merupakan gambaran besar pelayanan yang memuaskan bagi para *stakeholders* perangkat daerah. Demi memberikan kepuasan pelayanan kepada *stakeholders* dan keberlanjutan organisasi maka, Disperkim Kota Balikpapan perlu membuat beberapa inovasi dalam rangka hal tersebut. Inovasi -inovasi pada Disperkim Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

#### 1. Griyaku

Griyaku merupakan inovasi yang digagas oleh Kepala Disperkim Kota Balikpapan, H. Arfiansyah, ST, M.Si. Griyaku berangkat dari sasaran perencanaan strategis "Meningkatkan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)" GRIYAKU Balikpapan menjadi Gerakan Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan dengan melibatkan peran serta multi pihak, yang bertujuan tidak hanya mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni akan tetapi memudahkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"GRIYAKU Balikpapan" menghasilkan output terdiri dari :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian BSPK RTLH.
- b. Form Pendataan RTLH secara online yang dapat dilihat melalui 2 (dua) link berikut: <https://bit.ly/RTLHBPN> dan <https://disperkim.balikipapan.go.id>
- c. Bank data RTLH per 4 november 2022 sebanyak 2.421 unit RTLH. Terdapat 5 (lima) jenis data RTLH sebagai Bank Data RTLH yaitu: (i) Data Fisik : RTLH reguler dan RTLH terdampak bencana, (ii) Data Non Fisik : Penghasilan MBR/Non MBR, Status hunian (sewa/milik), dan Status lahan (legal/illegal)
- d. "GRIYAKU Balikpapan" menghasilkan 5 (lima) Program/Kegiatan yaitu: (i) rehab RTLH reguler, (ii) rehab RTLH terdampak bencana, (iii) fasiliasi

rusunawa, (iv) fasilitasi KPR ringan untuk MBR, (v) hibah/penataan kawasan/relokasi.





## VI. PENUTUP

Ranwal Renja Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam VISI dan MISI Pemerintah Kota Balikpapan. Ranwal Renja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Renja memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan daerah, secara umum renja OPD dapat menjawab tiga hal mendasar, yaitu :

1. Langkah dan Kebijakan strategis yang akan diambil agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Memberikan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang akan dicapai dalam satu tahun.
3. Sebagai komitmen OPD dan seluruh unsur didalamnya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Ranwal Renja Disperkim Kota Balikpapan Tahun 2024 ini diharapkan juga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Renja ini juga dimaksudkan sebagai komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk menghasilkan kinerja yang nyata dimasa mendatang dalam upaya mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni.

Balikpapan, Desember 2022

**KEPALA DINAS**

**Arfiansyah**